

## **ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, PENGANGGURAN, DAN INFLASI TERHADAP KEMISKINAN**

Muhammad Syukron Ma'mun<sup>1\*</sup>, Faiq Fuadi<sup>2</sup>

Departement of Economics and Development Studies, Universitas Diponegoro, Indonesia<sup>1</sup>

Faculty of Economics and social sciences, Universitas Sultan Fatah Demak, Indonesia<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This study aims to analyze the effect of gross regional domestic product, human development index, unemployment, and inflation on poverty using panel data for 5 cities in the Ex-Residency of Pati during the 2010-2018 period. In 2018, the poverty rate in the ex-Residency of Pati reached 12% compared to other areas in Central Java. The type of data is secondary data obtained from Central Java Province Statistics Agency. Descriptive analysis and panel data regression analysis methods were used to answer research objectives. The results confirm that gross regional domestic product, human development index, and inflation have a negative effect on poverty. On the contrary, unemployment has a positive effect on poverty.*

**Keywords:** *Poverty; gross regional domestic product; human development index; unemployment; inflation.*

**JEL Classification:** *I30, O15, E24, E31*

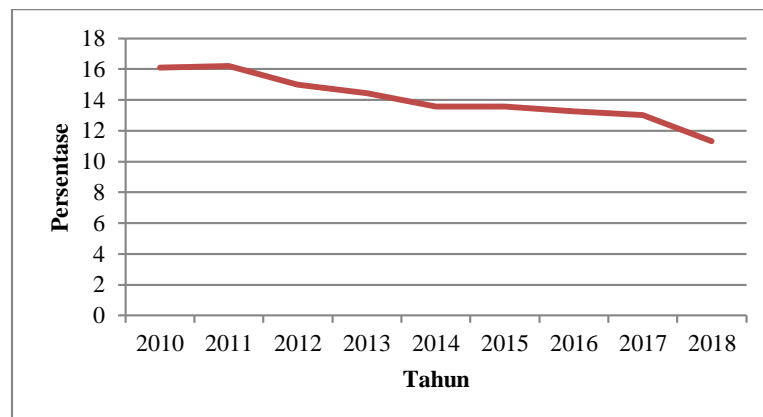
### **PENDAHULUAN**

Salah satu tujuan pembangunan nasional menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum berarti kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial seseorang agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kesejahteraan umum dapat digambarkan oleh tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat. Implikasi dari masalah kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia walaupun kehadirannya sering kali tidak disadari oleh manusia (Suparlan, 1993). Menurut definisi yang lebih luas, kemiskinan bersifat multidimensi, artinya kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam yang selanjutnya dapat dipandang melalui berbagai aspek. Ditinjau dari aspek primer, kemiskinan meliputi miskin terhadap aset, rendahnya partisipasi organisasi sosial politik, serta terbatasnya pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan aspek sekunder meliputi miskin terhadap jaringan sosial, rendahnya sumber-sumber keuangan, dan terbatasnya informasi. Menelaah kemiskinan secara multidimensi sangat diperlukan untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara komprehensif dan berkesinambungan (Suryawati, 2005).

\*Corresponding Author: Muhammad Syukron Ma'mun, Departement of Economics and Development Studies, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Moeliono Trastotenojo, Tembalang, Semarang, Indonesia 50275, muhammadsyukronmamun@students.undip.ac.id

Persentase jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 cenderung masih tinggi yaitu diatas 10 persen. Beberapa program pemerintah Jawa Tengah yang ditujukan bagi penduduk miskin dijalankan pemerintah sejak 2010 memiliki dampak positif bagi penurunan angka kemiskinan. Hal ini dapat dilihat pada terus menurunnya angka kemiskinan, baik dalam jumlah maupun persentase penduduk miskin seperti terlihat pada gambar 1. Namun, laju penurunan persentase penduduk miskin cenderung melambat karena adanya perlambatan laju pertumbuhan pada sektor usaha yang banyak menyerap tenaga kerja dari penduduk miskin, adanya peningkatan garis kemiskinan karena meningkatnya inflasi bahan pangan, dan belum optimalnya sinergi antarprogram pengentasan kemiskinan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2013).

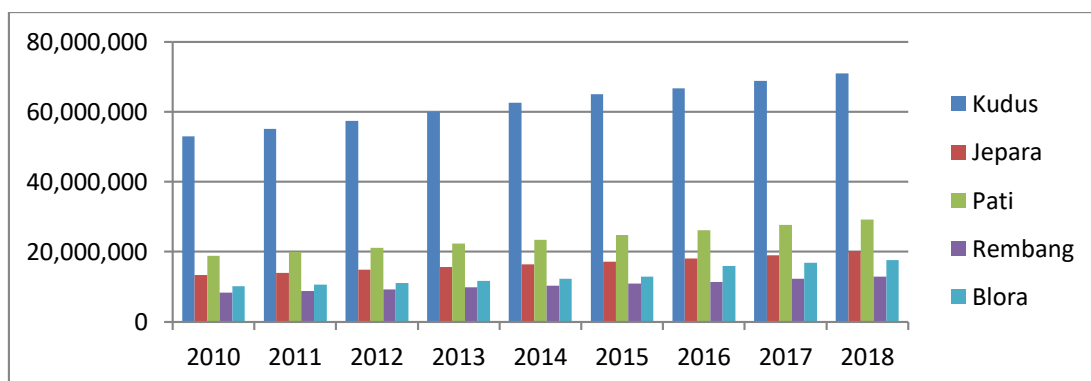
**Gambar 1 Persentase Penduduk Miskin (Persen) di Jawa Tengah Tahun 2010-2018**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018

Produk domestik regional bruto merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah dalam suatu periode. Produk domestik regional bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu daerah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu daerah.

**Gambar 2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018

Pada gambar 2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Eks-Karesidenan Pati mengalami pertumbuhan yang positif, kalau dilihat lebih rinci pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi didominasi oleh Kabupaten Kudus. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya produk domestik regional bruto Kabupaten Kudus.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan kualitas modal manusia (*human capital*). Peningkatan pengetahuan dan keterampilan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja sehingga tingkat kemiskinan akan menurun. Sejak tahun 1999, United Nations Development Program memperkenalkan konsep pengukuran kualitas modal manusia (*human capital*) yang diberi nama *Human Development Index* atau disebut Indeks Pembangunan Manusia.

**Tabel 1 Indeks Pembangunan Manusia**

| Kabupaten | Indeks Pembangunan Manusia |       |       |       |       |       |       |       |       | Rata-Rata |
|-----------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|           | 2010                       | 2011  | 2012  | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |           |
| Kudus     | 69,62                      | 69,89 | 70,57 | 71,58 | 72    | 72,72 | 72,94 | 73,84 | 74,58 | 71,97     |
| Jepara    | 66,76                      | 67,63 | 68,45 | 69,11 | 69,61 | 70,02 | 70,25 | 70,79 | 71,38 | 69,33     |
| Pati      | 65,13                      | 65,71 | 66,13 | 66,47 | 66,99 | 68,51 | 69,03 | 70,12 | 70,71 | 67,64     |
| Rembang   | 64,53                      | 65,36 | 66,03 | 66,84 | 67,4  | 68,18 | 68,6  | 68,95 | 69,46 | 67,26     |
| Blora     | 63,02                      | 63,88 | 64,7  | 65,37 | 65,84 | 66,22 | 66,61 | 67,52 | 67,95 | 65,68     |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Eks-Karesidenan Pati yang mengalami pertumbuhan yang positif, indeks pembangunan manusia di Eks-Karesidenan Pati pun juga menunjukkan menunjukkan *trend* yang positif setiap tahunnya seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh berbagai daerah. Menurut *International Labour Organization*, pengangguran didefinisikan sebagai mereka yang termasuk dalam kelompok penduduk usia kerja yang selama periode tertentu tidak bekerja, bersedia menerima pekerjaan, dan sedang mencari pekerjaan. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, yang dimaksud dengan pengangguran adalah jumlah angkatan kerja yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan.

**Tabel 2 Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)**

| Kabupaten | Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen) |       |       |      |      |      |      |      | Rata-Rata |
|-----------|---------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----------|
|           | 2010                                  | 2011  | 2012  | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 |           |
| Kudus     | 6,22                                  | 8,32  | 5,89  | 8,07 | 5,03 | 5,04 | 3,56 | 3,33 | 5,68      |
| Jepara    | 4,56                                  | 5,48  | 4,29  | 6,34 | 5,09 | 3,12 | 4,84 | 3,78 | 4,69      |
| Pati      | 6,22                                  | 11,17 | 11,98 | 7,29 | 6,37 | 4,43 | 3,83 | 3,61 | 6,86      |
| Rembang   | 4,89                                  | 7,22  | 5,75  | 5,97 | 5,23 | 4,51 | 3,19 | 2,87 | 4,95      |
| Blora     | 5,49                                  | 6,9   | 4,75  | 6,23 | 4,3  | 4,68 | 2,85 | 3,26 | 4,81      |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 2 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Eks Karesidenan Pati mengalami *trend* penurunan dalam hal pengangguran terbuka, jika

dilihat lebih detail tingkat pengangguran terbuka yang paling tinggi terdapat di Kabupaten Pati dengan rata-rata sebesar 6,86%.

Inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hal tersebut dikarenakan semakin tinggi tingkat inflasi, maka masyarakat yang pada awalnya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan adanya kenaikan harga barang dan jasa, mereka jadi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga menimbulkan kemiskinan. Gambaran dari inflasi di Eks-Karesidenan Pati tahun 2010-2018 disajikan dalam tabel 3.

**Tabel 3 Inflasi (Persen)**

| Kabupaten | Inflasi (Persen) |      |      |      |      |      |      |      |      | Rata-Rata |
|-----------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----------|
|           | 2010             | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |           |
| Kudus     | 7,65             | 3,34 | 4,77 | 8,31 | 8,59 | 3,28 | 2,32 | 4,17 | 3,11 | 5,06      |
| Jepara    | 6,24             | 3,59 | 4,52 | 7,95 | 9,87 | 4,57 | 3,45 | 2,83 | 4,2  | 5,25      |
| Pati      | 6,36             | 2,3  | 3,92 | 7,57 | 8,01 | 3,23 | 2,31 | 3,51 | 2,77 | 4,44      |
| Rembang   | 6,61             | 2,73 | 4,28 | 6,88 | 7,59 | 2,66 | 1,75 | 3,31 | 2,53 | 4,26      |
| Blora     | 7,17             | 2,26 | 3,55 | 7,94 | 7,13 | 2,85 | 2,14 | 2,98 | 2,78 | 4,31      |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018

Beberapa penjelasan sebelumnya menjadi latar belakang penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh produk domestik regional bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi terhadap persentase penduduk miskin di wilayah Eks-Karesidenan Pati selama periode 2010-2018.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kemiskinan

Menurut Sumitro Djojohadikusumo (1995) pola kemiskinan ada empat yaitu, Pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti dijumpai pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Sedangkan menurut BPS (Badan Pusat Statistik), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari.

### Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Sukirno, (1997) dalam Saputra, (2011), Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan menurut BPS Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya struktur perekonomian dan peranan sektor ekonomi. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu besaran PDRB yang

dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi sumber daya alam dan faktor produksi Daerah tersebut. Adanya keterbatasan dalam penyediaan faktor-faktor tersebut menyebabkan besaran PDRB bervariasi antar daerah. Produk domestik bruto yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu daerah sehingga penurunan tingkat kemiskinan (Dama et al., 2016). Sehingga dapat diketahui bahwa Produk Domestik Regional Bruto memiliki hubungan dengan Angka Kemiskinan. Kuznet (2001) dalam Permana (2012), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan tingkat kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan stabilitas sosial, kelembagaan, dan politik berpotensi untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam jangka panjang (Prasad, 1998).

### **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM dibentuk untuk menekankan pribadi dan kemampuannya merupakan tolak ukur utama dalam mengukur perkembangan negara. IPM menggambarkan bagaimana hasil pembangunan diakses oleh masyarakat sehingga kualitas hidup dapat terbentuk melalui pendapatan, kesehatan, edukasi, dan sebagainya (Ningrum, 2017). Dimensi dari IPM meliputi usia hidup, pendidikan, dan kelayakan hidup. Terdapat empat pengelompokan IPM yaitu rendah (kurang dari 60), sedang (60-69), tinggi (70-79), dan sangat tinggi (lebih dari 80).

Menurut Napitupulu (2007) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan.

Salah satu modal manusia yang paling penting adalah pendidikan formal (Todaro, 2013). Menurut perspektif ekonomi, tingkat pendidikan adalah modal dasar (*assets*) dan bukan beban (*liabilities*) bagi proses produksi. Semakin baik akses bagi masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan, maka semakin besar kesempatan mereka untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, ada keterkaitan yang sangat kuat antara kesehatan dan kemiskinan (Strauss dan Thomas, 1995). Kesehatan dapat menentukan produktivitas masyarakat sehingga semakin rendah tingkat kesehatan, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk terjebak dalam kemiskinan. Upaya pemerintah dalam memperbaiki sarana dan prasarana kesehatan penting dalam mengentaskan kemiskinan (Arsyad, 2010).

### **Pengangguran**

Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja (BPS dalam Segoro dan Pou, 2015). Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan

orang kehilangan suatu pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan (Mankiw dalam Riva, Kadir, dan Setiawan, 2014).

### **Inflasi**

Inflasi secara umum dipahami sebagai kenaikan harga dari semua barang dan jasa akhir yang terjadi secara terus-menerus. Inflasi yang tidak terkendali menyebabkan harga-harga barang dan jasa akan meningkat. Apabila inflasi tidak dibarengi dengan peningkatan pendapatan dan bahkan pendapatan masyarakat tetap maka kondisi tersebut akan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Barro (2013) mendefinisikan inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus. Menurut Mankiw (2006:194) bahwa inflasi merupakan hal yang wajar, ada variasi penting pada tingkat kenaikan harga. Publik sering memandang laju inflasi yang tinggi ini sebagai masalah utama dalam perekonomian.

### **Penelitian terdahulu**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puspita (2015) menyatakan bahwa variabel produk domestik regional bruto memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Yoga (2012) menyatakan bahwa variabel pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2014) menyatakan bahwa variabel pendidikan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Marmujiono (2014) menyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan rasio ketergantungan memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Brebes.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data panel tahun 2010-2018 dari 5 kabupaten di wilayah Eks-Karesidenan Pati meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. Pemilihan kabupaten-kabupaten tersebut dan kurun waktu yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada ketersediaan data dan kebutuhan akan *balanced panel*. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari lima variabel, yaitu persentase penduduk miskin sebagai variabel dependen, produk domestik regional bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi sebagai variabel independen. Jenis data dari variabel penelitian berupa data sekunder. Keseluruhan data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Persentase penduduk miskin diukur dalam satuan persen, produk domestik regional bruto diukur dalam satuan juta rupiah, Indeks Pembangunan Manusia diukur dalam satuan indeks, tingkat pengangguran terbuka diukur dalam satuan persen, dan inflasi diukur dalam satuan persen. Metode analisis deskriptif dan analisis regresi data panel digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan penyajian data berupa tabel, grafik, atau gambar. Sedangkan analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Variabel produk domestik

regional bruto menggunakan logaritma natural agar hubungan yang tidak linear dapat digunakan dalam model linear dan membuat model menjadi lebih baik (Benoit, 2011). Adapun persamaan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha_{it} + \beta_1 \ln(X1)_{it} + \beta_2 X2_{it} + \beta_3 X3_{it} + \beta_4 X4_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

di mana:

|                    |  |
|--------------------|--|
| $Y_{it}$           | : persentase penduduk miskin di kabupaten $i$ pada tahun $t$                       |
| $\ln(X1)_{it}$     | : logaritma natural produk domestik regional bruto di kabupaten $i$ pada tahun $t$ |
| $X2_{it}$          | : Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten $i$ pada tahun $t$                       |
| $X3_{it}$          | : tingkat pengangguran terbuka di kabupaten $i$ pada tahun $t$                     |
| $X4_{it}$          | : inflasi di kabupaten $i$ pada tahun $t$  |
| $\alpha_{it}$      | : konstanta  |
| $\beta_n$          | : koefisien  |
| $\varepsilon_{it}$ | : <i>residual (error term)</i>   |

Sebelum melakukan estimasi, persamaan data panel perlu melalui beberapa tahapan analisis data. Mulai dari menentukan model terbaik antara *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, atau *Random Effect Model* menggunakan teknik estimasi model, hingga melakukan uji asumsi klasik sebelum uji statistik untuk memperoleh interpretasi hasil regresi. Untuk mengetahui model terbaik, maka dilakukan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Setelah mendapatkan model terbaik, maka selanjutnya melakukan uji asumsi klasik. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Jarque-Bera (JB)*. Jika hasil dari JB statistik lebih besar dari *Chi-square* tabel, maka *residual* tidak memiliki distribusi normal. Namun, jika hasil dari JB statistik lebih kecil dari *Chi-square* tabel, maka *residual* memiliki distribusi normal (Gujarati, 2011). Kemudian, multikolinearitas dapat dideteksi melalui korelasi antara dua variabel independen yang melebihi 0,80. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,80, maka tidak ada masalah multikolinearitas. Namun, jika probabilitasnya lebih besar dari 0,80, maka ada masalah multikolinearitas. Kemudian, heteroskedastisitas dapat dideteksi melalui uji *Glejser*. Uji *Glejser* dilakukan dengan cara melakukan regresi variabel independen terhadap *residual absolut*. Terakhir, autokorelasi dapat dideteksi melalui uji *Lagrange Multiplier*. Uji *Lagrange Multiplier* akan menghasilkan statistik *Breusch-Godfrey* sehingga uji *Lagrange Multiplier* juga kadang disebut uji *Breusch-Godfrey*. Pengujian *Breusch-Godfrey* dilakukan dengan cara melakukan regresi pada *residual*  $U_t$  menggunakan *autoregressive model* dengan orde  $p$ .

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penentuan model terbaik melalui uji *Chow* dan uji *Hausman* pada 5 kabupaten di wilayah Eks-Karesidenan Pati menggunakan sistem komputasi EViews 10. Berdasarkan uji penentuan model terbaik yang telah dilakukan, maka model regresi yang digunakan dalam melakukan estimasi adalah *Fixed Effect Model*. *Fixed Effect Model* dipilih sebagai model estimasi terbaik karena mendukung tujuan

peneliti, memiliki  $Adj-R^2$  yang paling tinggi, dan seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini signifikan dengan taraf nyata 5%. Kemudian, penelitian ini menggunakan pembobotan GLS, yakni *cross section SUR* (GLS menggunakan estimasi *residual covariance matrix cross section*) karena terdeteksi adanya masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Metode tersebut mampu mempertahankan sifat efisiensi estimatornya tanpa harus menghilangkan sifat ketidakbiasan dan konsistensi estimator. Setelah mendapatkan model terbaik, maka selanjutnya melakukan uji asumsi klasik. Lantaran metode estimasi yang digunakan adalah *Generalized Least Square* (GLS), maka asumsi klasik yang harus dipenuhi hanya normalitas dan multikolinearitas. Hal ini karena pada metode estimasi *Generalized Least Square* (GLS) atau *Feasible Generalized Least Square* (FGLS) telah mengakomodir permasalahan heteroskedastisitas dan autokorelasi (Gujarati dan Porter, 2010). Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa *residual* dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. Kemudian, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antarvariabel independen yang tinggi di atas 0,80. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen. Berikut ini adalah persamaan regresi data panel dengan menggunakan *Fixed Effect Model*:

$$Y = 126,8761 - 5,577201 \ln X_1 - 0,295752 X_2 + 0,038262 X_3 - 0,070226 X_4 \quad (2)$$

Uji signifikansi dilakukan pada tahapan sebelum proses interpretasi akhir untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Pengujian ini meliputi perhitungan F statistik, t statistik, dan nilai *adjusted R<sup>2</sup>*. Ringkasan hasil uji signifikansi disajikan dalam tabel 4.

**Tabel 4 Uji Signifikansi**

| Variabel Dependen | Variabel Independen | Koefisien | Prob. t-Statistik | Prob. F-statistik | Adj-R <sup>2</sup> |
|-------------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Y                 | ln(X1)              | 5.577201  | 0.0000            | 0.000000          | 0.979404           |
|                   | X2                  | 0.295752  | 0.0000            |                   |                    |
|                   | X3                  | 0.038262  | 0.0239            |                   |                    |
|                   | X4                  | 0.070226  | 0.0013            |                   |                    |

Sumber : Data diolah

Koefisien determinasi menunjukkan besarnya nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,979404 yang berarti variasi lima variabel independen mampu menjelaskan 97,94% variasi variabel persentase penduduk miskin (Y). Jadi model regresi sangat baik, sedangkan sisanya 2,06% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian, diperoleh nilai F statistik sebesar 232,8196 dengan probabilitas sebesar 0,000000. Oleh karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien regresi produk domestik regional bruto (lnX1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), tingkat pengangguran terbuka (X3), dan inflasi (X4) tidak sama dengan nol atau kelima variabel independen secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin (Y). Terakhir, hasil uji t statistik



menunjukkan bahwa variabel independen produk domestik regional bruto (lnX1), Indeks Pembangunan Manusia (X2), tingkat pengangguran terbuka (X3), dan inflasi (X4) berpengaruh terhadap persentase penduduk miskin (Y) dengan nilai signifikansi 0,05.

### **Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto**

Variabel produk domestik regional bruto memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Eks-Karesidenan Pati. Kenaikan produk domestik regional bruto sebesar 1% dengan asumsi ceteris paribus atau variabel lain tidak mengalami perubahan akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 5,577201% di Eks-Karesidenan Pati. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dama et al (2016) yang berjudul pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap tingkat kemiskinan di kota manado (tahun 2005-2014) dimana hasilnya menunjukkan PDRB berpengaruh signifikan dan negatif terhadap kemiskinan. Hasil yang sama dilakukan oleh Suliswanto (2010) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa produk domestik bruto berpengaruh terhadap kemiskinan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Leonita (2019) di dapati hasil yang berbeda, dimana produk domestik bruto berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia. Cholili (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Sering kali pemerintah berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan mengharapkan terjadinya *trickle down effect*. Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan produk domestik regional bruto tanpa memperhatikan apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil (Sukirno, 1999). Menurunnya produk domestik regional bruto akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas konsumsi masyarakat. Apabila tingkat pendapatan menurun, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa melakukan penyesuaian dengan mengubah pola konsumsi mereka. Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur berdasarkan perkembangan produk domestik regional bruto, tetapi juga perlu memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan pada setiap lapisan masyarakat serta siapa saja yang telah menikmati hasilnya.

### **Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia**

Variabel Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Eks-Karesidenan Pati. Kenaikan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1 satuan dengan asumsi ceteris paribus atau variabel lain tidak mengalami perubahan akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,295752% di Eks-Karesidenan Pati. Hasil ini sesuai dengan penelitian Cholili (2014). Salah satu strategi pengentasan kemiskinan adalah melalui pembangunan sumber daya manusia (Arsyad, 2010). Sebaliknya pada penelitian yang dilakukan Leonita (2019) di dapati hasil yang berbeda, dimana indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator pembangunan manusia, apabila Indeks Pembangunan Manusia meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan dengan demikian maka kemiskinan akan menurun. Pendidikan merupakan investasi yang dilakukan di masa kini dengan tujuan memperoleh hasilnya di masa yang akan datang. Setiap tambahan satu tahun pendidikan berarti

peningkatan kemampuan kerja dan tingkat pendidikan, meskipun juga berarti penundaan penerimaan penghasilan selama satu tahun pendidikan tersebut (Simanjuntak, 1985). Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dalam jangka panjang akan meningkatkan produktivitas, khususnya bagi masyarakat prasejahtera. Perbaikan akses terhadap pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) merupakan instrumen kebijakan yang penting dalam strategi pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Pengangguran**

Variabel tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Eks-Karesidenan Pati. Kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% dengan asumsi ceteris paribus atau variabel lain tidak mengalami perubahan akan meningkatkan persentase penduduk miskin sebesar 0,038262% di Eks-Karesidenan Pati. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hong dan Pandey (2007) yang menyatakan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Hasil serupa juga didapatkan oleh Mahsunah (2011) dan Cholili (2014) yang menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan. Sebaliknya pada penelitian yang dilakukan Leonita (2019) di dapati hasil yang berbeda, dimana pengangguran berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia. Pada umumnya, masyarakat miskin menghadapi permasalahan keterbatasan kesempatan kerja dan keterbatasan modal untuk pengembangan usaha. Para tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya bekerja paruh waktu selalu berada di antara kelompok masyarakat miskin (Arsyad, 2010). Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat. Sering kali terjadi *trade-off* antara pengangguran dan kemiskinan karena keterkaitan yang sangat kuat satu sama lain (Agénor, 2004). Keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan tersebut yaitu bahwa kemiskinan merupakan efek jangka panjang dari pengangguran (Engbersen dkk., 2006). Pengangguran tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme pasar sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut (Sukirno, 2012).

### **Pengaruh Inflasi**

Variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin di Eks-Karesidenan Pati. Kenaikan inflasi sebesar 1% dengan asumsi ceteris paribus atau variabel lain tidak mengalami perubahan akan menurunkan persentase penduduk miskin sebesar 0,070226% di Eks-Karesidenan Pati. Hal ini sesuai dengan penelitian Latif Kharie (2007) yang menyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara inflasi dan tingkat kemiskinan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Srisinto (2018) juga menyatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Hasil serupa pada penelitian yang dilakukan oleh Andrawina (2019) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di wilayah provinsi Lampung. Sedangkan hasil penelitian ini berbeda dengan hasil yang dilakukan oleh Desrini (2018), dalam penelitiannya menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Inflasi merupakan determinan makroekonomi bagi

perubahan kondisi tingkat kemiskinan suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perbaikan distribusi pendapatan pada setiap lapisan masyarakat dapat meningkatkan daya beli kolektif dan pengeluaran per kapita sehingga mengurangi jumlah penduduk miskin atau menurunkan tingkat kemiskinan suatu daerah.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan empiris menunjukkan bahwa produk domestik regional bruto, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan inflasi merupakan determinan utama persentase penduduk miskin di Eks-Karesidenan Pati. Perlu diperhatikan bahwa produk domestik regional bruto, Indeks Pembangunan Manusia, dan inflasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan secara statistik terhadap persentase penduduk miskin di Eks-Karesidenan Pati, tetapi tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh positif yang signifikan secara statistik terhadap persentase penduduk miskin.

Implikasi kebijakan yang dapat direkomendasikan, di antaranya adalah diharapkan pemerintah daerah di wilayah Eks-Karesidenan Pati dapat memberikan pelayanan di sektor pendidikan secara gratis dan cuma-cuma khususnya bagi masyarakat miskin. Sehingga kualitas SDM lebih meningkat yang diharapkan dapat menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Perhatian pemerintah terhadap kesehatan juga masih perlu ditingkatkan dengan pelayanan kesehatan gratis, memperbanyak puskesmas khususnya pada masyarakat desa miskin dan tertinggal.

Langkah lain bisa dilakukan yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat termasuk penduduk miskin dengan mengharapakan terjadinya *trickle down effect*, memperbaiki akses terhadap pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) untuk meningkatkan kualitas modal manusia (*human capital*) yang selanjutnya meningkatkan produktivitas kerja seseorang, mencari pendekatan terbaik untuk menekan angka pengangguran misalnya dengan memberdayakan UMKM, dan menjaga inflasi dalam batas yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat melalui rangsangan kegiatan usaha produksi pada sektor riil sehingga dampaknya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agénor, P. R. (2004). Unemployment-Poverty Trade-Off. World Bank Poverty Reduction and Economic Management Division.
- Andrawina. (2019) Hubungan Negatif Antara Tingkat Inflasi dengan Tingkat Kemiskinan di Wilayah Perdesaan Provinsi Lampung. *Statistika*, Vol. 19 No. 1, 63 – 69
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2013). Pembangunan Daerah dalam Angka Tahun 2013. Jakarta: Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Bappenas.
- Barro, R. J. (2013). Inflation and economic growth. *Annals of Economics & Finance*, 14(1).

- Benoit, Kenneth. (2011). Linear Regression Models with Logarithmic Transformations. London School of Economics: Methodology Institute.
- Cholili, F. M. (2014). Analisis Pengaruh Pengangguran, PDRB, dan IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin (Studi Kasus: 33 Provinsi di Indonesia). Malang: Universitas Brawijaya.
- Dama, H. Y., Lopian, A. L. C., & Sumual, J. I. (2016). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 549–561.
- Djojohadikusumo, Sumitro. (1995). Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.
- Engbersen, G., Schuyt, K., Timmer, J., & Van Waarden, F. (2006). Cultures of Unemployment: A Comparative Look at Long-Term Unemployment and Urban Poverty. Amsterdam University Press.
- Gujarati, Damodar N. & Porter, Dawn C. (2010). Basic Econometrics. New York: McGraw Hill.
- Gujarati, Damodar N. (2011). Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Kesatu. Jakarta: Salemba Empat.
- Kharie, Latif. (2007). Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Kemiskinan di Indonesia: 1976-2005. *Cita Ekonomika*, 1 (1).
- Leonita, Lily. Rini, Kurnia. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* Vol. 3 No. 2
- Mahsunah, D. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Mankiw, N. Gregory. (2006). Teori Ekonomi Makro. Jakarta: Erlangga
- Marmujiono, Slamet Priyo. (2014). Analisis Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Brebes Tahun 2009-2011. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/3521> (Diunduh tanggal 1 Oktober 2020)
- Napitupulu, A.S. (2007). Pengaruh Indikator Komposit IPM Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Di Sumatera Utara. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara
- Ningrum, SS. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184 – 192.
- Ningsih .Puti, Andiny. (2018) Analisis Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, Vol. 2.
- Permana, A.Y. & Arianti, F. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2004-2009. *Diponegoro Journal Of Economics*, Vol. 1, (No.3) : 1-8.
- Prasad, B. C. (1998). The Woes of Economic Reform: Poverty and Income Inequality in Fiji. *International Journal of Social Economics*, 25 (6/7/8): 1073-1094.

- Puspita, D. W. (2015). Analisis Determinan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 8 (1): 100-107.
- Saputra, W.A. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pdrb, Ipm, Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten / Kota Jawa Tengah. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Segoro, W. Muhamad AP. (2015). Analisis Pengaruh Produk Domestic Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2012. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 6(1), 28-34
- Simanjutak, Payaman J. (1985). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Srisinto. (2018). Inflasi dan IPM Peranannya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Implikasinya Pada Kemiskinan. *Jurnal Litbang Sukowati*. Vol 2 Hal. 58 - 74
- Strauss, J. & Thomas, D. (1995). Human Resources: Empirical Modeling of Household and Family Decisions. *Handbook of Development Economics*, 3: 1883-2023.
- Sukirno, Sadono. (1999). Makroekonomi Modern. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, Sadono. (2012). Makroekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suliswanto, Muhammad Sri. (2010). Pengaruh Produk Domestik Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Angka Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Suparlan, Parsudi. (1993). Kemiskinan di Perkotaan. Cetakan Kedua. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Suryawati, Chriswardani. (2005). Memahami Kemiskinan secara Multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8 (3): 121-129.
- Todaro, Michael P. dan Smith, Stephen C. (2013). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Wibowo, Mohamad Erhan. (2014). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pertanian, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Journal Of Economics*, 3 (4): 1-9.
- Yoga Permana, Anggit. (2012). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009.  
<http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=75117>  
(Diunduh tanggal 1 Oktober 2020)
- Young P. Hong, P. dan Pandey, S. (2007). Human Capital as Structural Vulnerability of US Poverty. *Equal Opportunities International*, 26 (1): 18-43.